

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dawud, J. (2006). *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Humanoria.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ranggoaini, dkk. (2012). *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa*. Yogyakarta: Combine Resources Institution (CRI).
- Richardus, E. I. (2002). *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Atmaja, D. A. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)*. Doctoral Dissertation. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Budi, Raharjo. (2001). *Membangun E-Government*. Institut Teknologi Bandung.
- Dewi, A. S. (2011). *Membuat E-Government Bekerja di Desa: Analisis Actor Network Theory Terhadap Sistem Informasi Desa dan Gerakan Desa Membangun*. Jurnal Mandatory (The Journal of Institute for research and Empowerment). P. 89.
- Fitri, T. A., Nasution, T., & Herwin, H. (2015). *Pengembangan Model Pelayanan Kantor Desa terhadap Masyarakat Berbasis Mobile Computing*. Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika.

- Heriyanto, A. (2015). *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2009). *Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet*. Universitas Gadjah Mada.
- Maulin Purwaningwulan, M., Kurniasih, D., & Afrianto, I. (2015). *Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan E-Desa di Kabupaten Bandung* (Kualifikasi Pendidikan Teknologi Perangkat Desa).
- Mayowan, Y. (2017). *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)*. Profit (Jurnal Administrasi Bisnis).
- Sosiawan, E. (2008). *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia : Perspektif Content dan Manajemen*. Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing*.
- Supangkat, S. H., & Negara, I. M. A. J. (2006). *Framework Strategi Implementasi E-Government*. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia.
- Supriadi, E. (2015). *Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan).
- Suradisastra, K. (2017). *Revitalisasi Kelembagaan Untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Otonomi Daerah*. Analisis Kebijakan Pertanian.
- Thaha, R. (2010). *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Utomo, T. W. W., & Wahyudi, A. (2008). *Penataan Kewenangan (Urusan) Pemerintahan Desa Dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)*.

Wahyono, S. B. (2011). *Optimalisasi Program Desa Informasi Melalui Penguatan Kelembagaan*. Jurnal Penelitian IPTEK-KOM.

Wibawa, R. F. (2017). *Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Paser*.

Peraturan Perundang-undangan :

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government*.

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Website/link :

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center> (*United Nations E-Government Development Database*), diakses pada 4 Oktober 2017 pukul 06:07 WIB.

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/>, (Cetak Biru Sistem Aplikasi *E-Government*), diakses pada 5 Januari 2017 pukul 00:50 WIB.